

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kompleksnya permasalahan politik dunia sekarang ini membuat semakin banyak topik yang menarik untuk dibahas. Permasalahan Libya merupakan salah satu topik yang akhir-akhir ini marak dibicarakan. Negara yang di pimpin oleh Muammar Qadhafi ini hampir selalu menjadi sorotan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkannya.

Namun apabila dahulu Libya yang dikenal karena kegigihannya dalam memusuhi Barat dan merupakan salah satu simbol radikalisme, maka pada awal Januari 2004 lalu Libya melakukan kebijakan yang hampir tidak dapat di duga sebelumnya. Pemerintah Libya bersedia membayar ganti rugi sebesar 2,7 milyar dolar bagi keluarga 270 korban ledakan bom dalam pesawat terbang Amerika di atas kota Lockerby Skotlandia pada akhir tahun 1988.¹ Hal ini sangat kontras dengan sikap Libya yang selama ini menyangkal bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pengeboman tersebut (Novermeber 1991). Peristiwa ini menandai normalisasi hubungan antara Libya dengan negara-negara lain di kancah internasional, khususnya Amerika.

¹ Ulasan redaktur Timur Tengah Bertus Hendrik;
terj : Yanti Mualim/Joss Wibisono, 14 Agustus 2003

Namun pencabutan sanksi embargo ekonomi di Libya tidaklah semulus yang kita pikirkan, karena ada beberapa kompensasi yang harus dilaksanakan oleh Libya, dan hal ini sangat merugikan bagi negara Islam lainnya yang selama ini ‘kelihatan’ begitu akrab dengan Libya. Sebenarnya apa yang terjadi pada Libya sehingga ia begitu berani untuk mengambil kebijakan seperti itu? Dengan alasan inilah penulis memilih judul skripsi :

**“ FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG NORMALISASI
LIBYA – BARAT (KHUSUSNYA AMERIKA SERIKAT)”**

B. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan, baik akademik maupun ilmu pengetahuan, dimana secara akademik adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tujuan penulisan skripsi ini selanjutnya secara ilmu pengetahuan adalah untuk memperdalam mengenai ilmu hubungan internasional terutama tentang faktor-faktor yang mendorong normalisasi hubungan Libya – Barat (AS) yang diharapkan menghasilkan pengetahuan baru, dan khususnya pula dapat mengetahui dan menganalisa secara mendalam tentang :

1. situasi politik dalam negeri Libya yang dapat mendukung normalisasi

2. situasi ekonomi dan militer Libya yang dapat mendukung normalisasi Libya dengan Negara barat (AS);
3. peristiwa internasional apa yang dapat mendukung normalisasi Libya dengan Negara barat (AS).

C. Latar Belakang Masalah

Libya merupakan sebuah negara yang berada di sebelah utara Afrika. Yang berbatasan langsung dengan Laut Mediterania, antara Mesir dan Tunisia. Apabila kita mendengar nama Libya, maka hal pertama yang akan terlintas dalam benak kita adalah pemimpin Libya yaitu Kolonel Muammar Abu Minyar Al Qadhafi. Sejak ia memegang tampuk kekuasaan pada 1 September 1969, Libya menganut sistem politik yang merupakan 'karangan' dari Qadhafi sendiri yaitu sebuah sistem yang merupakan gabungan antara Sosialisme dan Islam yang ia sebut dengan *Teori Internasional Ketiga*². Muammar Qadhafi bercita-cita agar rakyatnya dapat menikmati kemakmuran dan kesejahteraan secara merata yang diperoleh dari hasil bumi Libya berupa minyak. Dalam rangka mempromosikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang revolusioner, Qadhafi menggunakan diplomasi minyak untuk memperkenalkan ideologinya di luar wilayah Libya pada tahun 1970-1980-an. Dia juga merupakan sosok yang sangat membenci imperialisme Barat. Hal ini terlihat dari idenya untuk membentuk Pan-Arabisme sebagai penyatuan

² CIA the world fact book of Libya, www.cia.gov, 14/07/2005 11:56:07 AM PDT

negara-negara Arab untuk memerangi Barat. Salah satu sorotan Qadhafi saat itu adalah masalah Palestina-Israel.

Dan semenjak saat itulah Qadhafi di cap sebagai musuh nomor satu Barat. Hal ini dikarenakan oleh sepak terjang Qadhafi dalam memerangi imperialisme Barat yang tidak hanya terbatas pada negara tetangganya saja, Qadhafi juga ikut andil dalam pendanaan, penyediaan fasilitas pelatihan militer bagi kelompok-kelompok Palestina radikal, kelompok muslim Filipina dan berbagai aksi kekerasan kelompok IRA yang menentang Inggris.

Pencitraan negatif barat terhadap Qadhafi dianggap berhasil. Qadhafi diasosiasikan sebagai pemimpin yang revolusioner yang mengobarkan semangat permusuhan, mendukung pembajakan udara, aksi peledakan bom, gerakan pemberontakan dan terorisme. Sampai puncaknya adalah terjadinya tragedi peledakan bom di atas pesawat PanAm, yang meledak di atas kota Lockerby Skotlandia pada tahun 1988. Tragedi ini menyebabkan 270 korban jiwa. Selain itu kasus peledakan bom lainnya yaitu sebuah pesawat Perancis di atas udara Afrika tahun 1989 turut memperpanjang daftar kejahatan Libya. Dan sebagai konsekwensinya pada tahun 1992 PBB menetapkan sanksi ekonomi terhadap Libya. Hal ini secara telak mematikan perekonomian Libya, yang sangat bergantung dengan industri minyak mereka. Karena semua akses teknologi dan transportasi (khususnya udara) terputus. Hal ini menjadi keputusan

Libya menarik semua personilnya. Dalam catatan, setelah di embargo Libya hanya bisa mengekspor minyak dalam jumlah yang sangat kecil, itupun dalam bentuk minyak mentah (crude oil)³.

Oleh sebab itulah normalisasi hubungan antara Libya dengan pihak negara-negara Barat merupakan angin segar bagi perekonomian Libya. Kesiediaan Libya membayar kompensasi kasus Lockerby maupun kasus pesawat Perancis membuat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mencabut sanksi ekonominya. Namun pencabutan sanksi oleh PBB itu tidak membuat pihak AS dan sekutunya menghentikan tindakan pengucilan terhadap Libya. Perubahan besar baru terjadi pada awal Desember 2003 ketika Qadhafi mengumumkan penghentian program persenjataan pemusnah massalnya, senjata nuklir, biologis dan lainnya. Hal ini diumumkan melalui sebuah pidato sebelum dilakukannya Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress). Kongres ini di hadiri oleh beberapa perwakilan negara, seperti Pimpinan Delegasi Amerika Serikat (Curt Weldon), dan wakil dari lebih 100 negara. Hal ini bisa dianggap sebagai pengakuan Qadhafi dalam forum internasional. Dalam pidatonya, Qadhafi mengakui semua program persenjataannya, dan juga mengungkapkan kekecewaannya selama ini kepada semua 'kolega' nya yang ia anggap tidak pernah memperhatikan nasib Libya selama mereka di bawah sanksi ekonomi PBB.⁴

³ *Business Week*, 5/3/2004 Issue 3881, p51, 1p

⁴ *Insight on the news*; 3/3/2004, Vol. 20 Issue 8, p18, 4p, 5c

"Breakthrough with Muammar Qaddafi" by : Timmerman, Kenneth P.

Yang menjadi permasalahan dalam kebijakan normalisasi Libya ini adalah, adanya kebijakan-kebijakan lain yang terasa janggal yang menyertai kebijakan normalisasi tersebut. Dan kebijakan 'susulan' ini sangat terkesan seperti mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu. Penulis mencatat beberapa kebijakan yang terasa 'janggal' tersebut, antara lain :

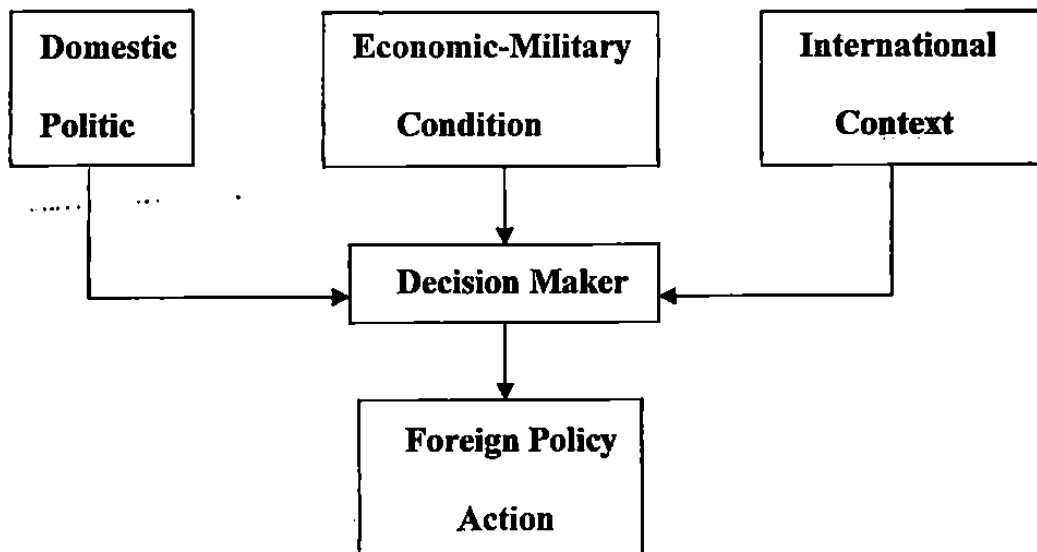
1. Libya bersedia mengakomodasi tuntutan Amerika untuk tukar-menukar data tentang keberadaan jaringan Al-Qaeda dan pasukan Republik Irlandia
2. Libya bersedia menyetop semua dukungan financial dan persenjataan kepada perjuangan Palestina
3. Libya bersedia merubah retorika permusuhannya selama ini terhadap Israel serta mengakui keberadaan Israel sebagai sebuah Negara dan mengusulkannya untuk menjadi anggota Liga Arab.

Memang banyak pengamat yang mengkritik kebijakan Libya selama di bawah Qadhafi menempuh suatu politik yang kontradiktif. Misalnya Libya menganjurkan persatuan Arab, tetapi sangat membatasi imigrasi Arab ke Libya terutama yang datang dari Mesir dan Tunisia. Atau Libya sangat anti Barat namun Negara ini bergabung dalam kapitalisme internasional. Namun yang perlu di catat, bahwa selama ini sikap Libya juga tidak pernah merugikan perjuangan-perjuangan kaum revolusioner lainnya. Hal ini membuat penulis bertanya hal-hal apakah yang mendorong Libya mengubah kebijakan politiknya hingga sedemikian drastis

yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari Negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi)”⁵

Untuk lebih jelasnya ilustrasi bagian di bawah ini akan menjelaskan interaksi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan luar negeri.

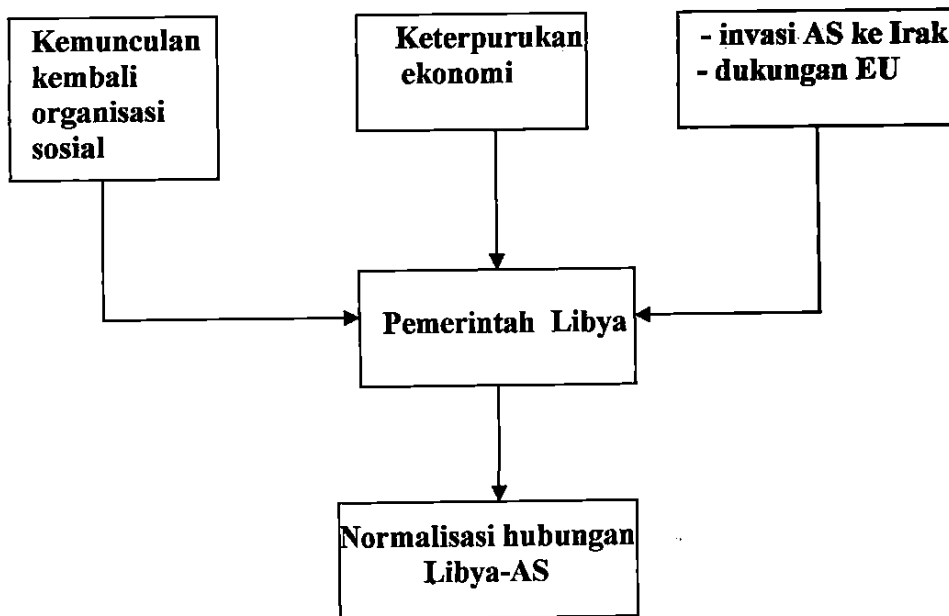
Gambar 1.1. Skema Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Suatu Negara Menurut William D.Choplin.



Sumber : *Prospektif*, Volume 4 No. 4, 1992

⁵Djumadi Anwar, *Diktat Politik Luar Negeri Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Oktober 2003

Gambar 1.2. Skema Aplikasi Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri Menurut William D. Choplin Dalam Masalah Normalisasi Libya-AS



- **Politik Dalam Negeri**

Melihat sistem politik di Libya yang otoriter dan diktator, maka perubahan politik dalam negeri yang bias mempengaruhi politik luar negeri adalah munculnya organisasi-organisasi social yang menyuarakan perubahan. Salah satunya adalah Qaddafi Foundation for Charitable Organization, yang disponsori oleh anak Qadhafi sendiri yaitu Seif al-Islam al Qaddafi. Organisasi ini merupakan organisasi yang menganjurkan dan menyuarakan modernisasi dan keterbukaan terhadap Barat.⁶ Seif mempunyai peran besar dalam membujuk ayahnya untuk mengambil

⁶ *Insight on the News*; 3/3/2004, Vol.20 Issue 8, p18, 4p,5c

Berita terbaru mengatakan bahwa pada awal Januari lalu, Qaddafi akhirnya bersedia mengakomodasi rekomendasi yang disampaikan oleh anaknya, dan langkah pertama yang ia lakukan adalah mereshuffle institusi pemerintah.

- **Kondisi Ekonomi dan Militer**

Pada dasarnya Negara ini sangat bergantung pada sumber daya minyak nya. Catatan menunjukkan bahwa semua pendapatan ekspor terbesar didapat dari sector minyak dan sector ini telah memberikan kontribusi sebesar $\frac{1}{4}$ dari jumlah GDP Libya. Bahkan sebelum diembargo oleh DK PBB, Negara ini merupakan Negara dengan jumlah GDP terbesar bila dibandingkan dengan Negara Afrika lainnya.⁸ Tapi embargo ekonomi PBB serta isolasi Negara-negara Barat terhadap Libya telah mematikan perekonomian Libya. Semua akses informasi dan transportasi udara dihentikan. Memang kondisi Libya saat itu tidak separah kondisi Iran saat di embargo oleh PBB, namun alokasi dana pemerintah yang lebih banyak dilarikan pada proyek-proyek persenjataan dan program nuklir. Sehingga pembangunan infrastruktur masyarakat menjadi terbengkalai.

⁸ www. CIA.gov, *the world fact book of Libya*

Seorang diplomat Eropa menggambarkan keadaan Libya saat itu seperti ini

*“streets in Libya bustling downtown market remain unpaved, telephones work only periodically, no foreign newspaper allowed, many simple project never get done, garbage not picked and buildings half-built across the country”*⁹.

Di lain pihak Universitas Libya setiap tahunnya selalu meluluskan para sarjana di berbagai bidang, yang pada akhirnya tidak bisa bekerja karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini membuat keresahan sosial semakin meningkat.

Nampaknya situasi ini membuat masyarakat banyak yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah, dan Qaddafi pun merasa bahwa rezimnya akan terancam apabila masalah ini tidak diselesaikan dan ditanggulangi dengan segera. Sehingga ia memutuskan untuk membuka kembali hubungan dengan Negara-negara barat, dengan harapan bahwa mereka akan kembali menanamkan investasi yang besar serta akses teknologi. Bahkan pihak Libya menginginkan sekitar \$30 milyar investasi luar negeri di Libya untuk meningkatkan produksi minyaknya sebesar 40%, dengan jumlah produksi 2,1 juta barrel per hari, dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.¹⁰ Sehingga proses pembangunan dapat kembali berjalan, sehingga masalah-masalah sosial yang ada dapat teratasi.

⁹ *ibid*, p4

¹⁰ *Business Week* 5/3/2004 Issue 3881, p5, 1p

Kondisi pertahanan dan militer.

Kondisi geografis Libya membuat Libya berbatasan langsung dengan beberapa Negara tetangganya yang kadang menimbulkan konflik antara keduanya. Libya pernah berperang dengan Chad. Dan sampai sekarang pun Libya masih mengalami konflik dengan pemberontak di perbatasan Libya.

Libya juga masih berkonflik dengan beberapa Negara tetangganya berkaitan dengan masalah pengklaiman batas wilayah. Libya mengklaim seluas 32.000 km² wilayah di selatan Algeria dan sekitar 25.000 km² di Nigeria.

Selain itu di daerah garis pantainya, Libya menghadapi masalah imigran gelap dan kejahatan lainnya, yang membuat Libya mendapat desakan dari pemerintah Italia untuk segera menangani masalah tersebut.

Dengan masih banyaknya persoalan dalam negeri yang dihadapi pemerintah Libya, maka pihak militer berusaha untuk meminta kepada pihak pemerintah untuk kembali membangun dan mengembangkan angkatan bersenjata Libya dengan bantuan dan dukungan dari Barat. Oleh sebab itu langkah awal dari terwujudnya semua itu adalah normalisasi dengan pihak Barat. Karena tujuan dan perhatian utama dari keberadaan angkatan bersenjata dan militer Libya adalah untuk menjaga integritas wilayah dan menjaga kedaulatan Libya.

Dan langkah pertama yang diambil Qadhafi berkaitan dengan hal ini adalah mereshuffle badan intelijen nya dan mengadakan reformasi di tubuh militer secara besar-besaran.

Selain itu sebagai syarat dicabutnya sanksi ekonomi, maka Libya harus menghentikan semua program nuklir dan persenjataannya (World Mass Destruction). Dan Qaddafi juga mereshuffle badan intelijen dan aparat keamanannya. Isu dan perdebatan proyek WMD Libya santer diperbincangkan orang sejak tahun 1980-an. Kendati data CIA mengatakan bahwa hal itu dimulai sejak 1970-an.¹¹ Libya berusaha keras untuk mendapat alih teknologi dengan bekerjasama dengan dan dari Rusia, China, Kore Utara, Ukraina, Pakistan.

Menurut informasi, Libya pada tahun 1979 berusaha untuk membeli reactor nuklir dari Uni Soviet. Namun program ini tidak berjalan karena ketidakpuasan Tripoli dengan teknologi Moskow. Kemudian proyek ini dilanjutkan dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan Belgia, *Belgonucleaire* di tahun 1984, tapi pemerintah Belgia mengamandemen izin kontrak dengan biaya \$ 1 milyar karena tidak tahan membendung tekanan dari Amerika.

Dari data CIA bahwa ambisi Libya untuk membangun WMD tidak berhenti, namun minimnya sumber daya manusia dan tekanan-tekanan Amerika dari segala penjuru untuk memasung Tripoli membuat proyek ambisius Qaddafi tersebut tidak kunjung berhasil.

¹¹ Ayalon, Ami and Barbara newson, *Middle east contemporary Survey* Volume xiii, The Moshe Dayan Center for Middle eastern and African Studies, The Shiloah Institute, Tel Aviv university, New York, Boulder, San Francisco and Oxford, 1989, p527

Dalam pidatonya di depan Libyan National Congress yang disaksikan oleh perwakilan dari 100 negara, Qaddafi mengatakan bahwa ia akan menghentikan program-program nuklirnya dan mempersilahkan tim inspeksi PBB datang ke Libya, ia bahkan menyetujui syarat-syarat yang ketat tentang non-proliferasi nuklir. Ini merupakan berita yang besar dan merupakan perkembangan yang membanggakan. Dan nampaknya prioritas negara ini sudah berubah dari *high politics* ke *low politics*. Hal ini terlihat dari keputusan Libya untuk menyetop dukungan kepada kelompok-kelompok yang di cap radikal oleh AS.

- **Konteks Internasional**

Peristiwa-peristiwa internasional yang terjadi tampaknya secara tidak langsung ikut mengubah pandangan Libya mengenai situasi internasional. Penulis mencatat ada beberapa peristiwa, antara lain :

1. invasi Amerika ke Irak, dengan dalih melawan terorisme global, sedikit banyak membuat Qaddafi berfikir bahwa hal yang sama mungkin juga akan terjadi kepadanya. Karena nota bene Libya adalah salah satu negara yang termasuk dalam daftar negara penyokong terorisme dalam catatan Amerika., dan hal ini membuat Libya tinggal menunggu waktu untuk di invasi oleh AS. Dan ia tidak mau berakhir sama dengna Saddam Hussein

2. munculnya Uni Eropa dalam dunia internasional membuat posisi Libya sedikit menguntungkan. Karena desakan normalisasi juga muncul di kawasan ini dengan latar belakang kepentingan yang berbeda. Misalnya Italia yang sangat mendesak dibukanya kembali hubungan dengan Libya agar ia bisa menyelesaikan masalah imigran gelap yang datang dari Libya melalui laut Mediterania, Italia berharap ia bisa memberikan bantuan agar Libya dapat lebih sigap dalam mengontrol daerah sekitar garis pantainya dan menangkap ratusan imigran gelap yang mencoba memasuki Eropa tiap bulannya. Negara Eropa lainnya mendukung usaha normalisasi ini karena punya kepentingan ekonomi di Libya, karena beberapa perusahaan minyak terbesar di Eropa masih mempunyai saham di Libya dan mereka terpaksa meninggalkannya karena sanksi ekonomi yang dikenakan pada Libya. Dengan adanya normalisasi yang secara otomatis juga akan menghapus sanksi dan embargo yang diterima Libya maka akses mereka untuk melakukan kegiatan bisnis di Libya juga akan terbuka lebar.

Memang konsekuensi yang harus dilakukan Libya bagi sebagian pihak dinilai sangat pragmatis. Namun nampaknya Libya dalam hal ini hanya akan berfikir rasional. Dan memutuskan untuk mengembangkan potensi dalam negerinya.

F. Hipotesa

Berdasarkan penjelasan kerangka teori di atas maka dapat diajukan hipotesa sebagai berikut :

Keputusan Libya untuk menormalisasi hubungan terhadap negara barat (AS) padahal sebelumnya Libya sangat keras terhadap tuntutan AS didukung oleh beberapa faktor :

1. kemunculan kelompok-kelompok sosial di dalam negeri yang menuntut perubahan;
2. kondisi ekonomi dan militer yang saling terkait. Dimana Qaddafi harus mengambil langkah yang strategis sehingga rezimnya bisa terus berjalan dan ekonomi dalam negerinya dapat membaik;
3. situasi internasional yang terjadi yang ikut mengubah pandangan Libya akan situasi dan kondisi sekarang.

G. Jangkauan Penulisan

Karena luas dan kompleksnya permasalahan maka dalam skripsi ini penulis menitik beratkan pokok permasalahan tentang : faktor-faktor yang mendukung normalisasi hubungan Libya dengan Barat (AS). Pengambilan data dimulai ketika Libya mendapatkan sanksi ekonomi dari PBB (tahun 1992). Sampai terjadinya titik balik dalam hubungannya dengan Negara barat (terutama AS), pada bulan Agustus 2003 ketika Libya bersedia membayar kompensasi kepada keluarga korban tragedi Lockerby, dan

H. Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, majalah-majalah, koran-koran, situs internet, serta tulisan-tulisan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode deskripsi kualitatif, yaitu data-data sekunder yang ada selanjutnya diinterpretasikan dengan menggunakan konsep, asumsi, dan teori. Hasil interpretasi tersebut disarikan dan kemudian menjadi kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Bab ini berisi uraian tentang alasan pemilihan judul, tujuan penulisan skripsi, latar belakang masalah, pokok permasalahan, landasan teori, hipotesa, jangkauan penulisan, metode pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : dalam bab II ini akan dibahas tentang dinamika hubungan Libya-AS. Yang akan dilihat melalui periodeisasi kepemimpinan di Libya yaitu pada era Muammarhi dan era

BAB III : Pada bab III diuraikan tentang pergeseran hubungan antara Libya-AS. Pergeseran hubungan ini dapat dilihat dalam 2 bidang yang menonjol yaitu bidang politik dan ekonomi.

BAB IV : Dalam bab ini akan diuraikan penerapan dari teori yang digunakan guna menjawab permasalahan factor-faktor apa saja yang mempengaruhi normalisasi hubungan Libya-AS. Mulai dari kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional yang ikut mempengaruhi munculnya kebijakan ini.

BAB V : Bab ini merupakan kesimpulan dari seluruh uraian dari bab-bab yang terdahulu. Yang antara lain berisi penemuan penulis dalam menganalisis masalah ini sesuai dengan isi dalam ilas